



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IYAN RUBIYANTO
2. Jabatan : DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI
3. NHK : 72174

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.718.686.000

1. Tanah Seluas 670 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 470.340.000
2. Tanah Seluas 2.276 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 186.632.000
3. Tanah Seluas 7.250 m2 di KAB / KOTA BOGOR, Rp. 998.406.000
4. Tanah Seluas 594 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI ,
Rp. 61.182.000
5. Tanah Seluas 6.000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI ,
Rp. 618.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.384.126.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 429.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO DAKAR Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 429.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 132.007.735

D. SURAT BERTAHAP Rp. 40.326.400

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 674.465.454

F. HARTA LAINNYA Rp. 81.960.522

Sub Total Rp. 5.076.446.111

III. HUTANG Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.076.446.111

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.